

“Jaga Rumah Serta Perkarangan Kita”

Dirgo D. Purbo

Pada peresmian Lembaga Ketahanan Nasional pada tanggal 20 Mei 1965, di Istana Negara, Presiden RI pertama Ir. Sukarno menyampaikan pidato berjudul “*Pertahanan Nasional Dapat Berhasil Maksimal Berdasarkan Geopolitik*”. Intisari pidato tersebut menjelaskan bahwa dengan memahami kondisi geopolitik suatu Negara, dapat diukur kekuatan nasional dan ditentukan arah kebijakan pertahanan nasional serta kebijakan politik luar negerinya. Dalam pidato itu diulas bagaimana Vietnam, sebagai satu contoh pembanding yang menghadapi berbagai gempuran pihak luar/musuh yang dilengkapi dengan persenjataan

moderen sekalipun (Perancis dan Amerika) tetap tidak mengalami kekalahan. Pemahaman geopolitik yang sangat mendasar, yang disampaikan beliau, yakni dengan menganalisa kondisi dalam negeri, antara lain geografi, kultur, demografi, sejarah, sosioekonomi, bila itu dihipunkan dan disinergikan akan menjadi suatu kekuatan nasional. Berbagai teori tentang geopolitik klasik yang dikembangkan oleh: Professor Friedrich Ratzel, German (1844-1904), Professor Rudolf Kjellen, Swedish (1864-1922), dan Sir Halford Mackinder, British (1861-1946), secara garis besar ketiga tokoh mempunyai pandangan yang sama atas pemahaman geopolitik seperti yang diringkas di bawah ini:

It must be regarded as a science bordering on geography, history, political

science and international relations. The politician, the military planner and the diplomat can use geopolitics as a method to analyze how geographical factors can be of important s when planning, Geopolitics as the destiny.

Ketika negara-negara industri mende-klarasikan *national vision*-nya, diper-lukan sumber energi yang dapat di-andalkan untuk menjamin pertum-buhan ekonomi, menunjang kegiat-an militer dan sekaligus mengaman-kannya, (*energy security*). Namun persoalan krusial bagi negara-negara maju tersebut, ialah cadangan energi-nya (minyak mentah) yang sangat ter-batas, sehingga menuju ke depan sumber energi yang diperlukan un-tuk kebutuhan konsumsinya sangat tergantung pada suplai yang berada di luar wilayah teritorial. (*oil depen-dency*). Melihat aspek minyak bagi negara-negara industri seperti Ame-rika, Inggris, Australia, Jerman, Je-pang, Cina, Korea Selatan dan bebe-rapa negara lainnya begitu strategis dan berperan sentral untuk memper-tahankan pertumbuhannya, maka *Energy security* yang terkait dengan dimensi geopolitik, geostra-tegi dan geoekonomi, selalu masuk di dalam agenda prioritas kepentingan

nasionalnya. Oleh karena itu semua elemen bangsa akan bersikap satu sua-ra untuk mencapai tujuan *Energy Se-curity* tersebut. Dari berbagai sum-ber kajian strategis (situsnet), terda-pat lima elemen pokok yang men-cakup *Energy Security* :

1. *Reliable availability of energy sup-ply at affordable price.*
2. *Protect Energy Sources and its trans- portation Reliable And distribution. (Ensuring the flow of oil)*
3. *Diversify energy supplies*
4. *Petroleum Strategic Stock*
5. *Promote Efficient Consumptions*

Ewan W Anderson yang menulis bu-ku *Global Geopolitics Flashpoints* berpendapat bahwa: *A flashpoint is defined here as a "current, dormant, or potential" area of geopolitical in-stability. It is a place where the in-terplay of geography and politics gives rise to chronic instability that, in most cases, exerts an influence well beyond local borders.*

Geopolitical Flashpoint

Konsepsi geopolitik Indonesia ialah Wawasan Nusantara. Jadi *geopoliti-cal flashpoint* Wawasan Nusantara

berada di Aceh, Riau, Palembang, Kalimantan Timur, Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Makasar, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Seram dan Irian Jaya. Sedangkan kondisi geopolitik Indonesia terdapat *Strategics Sea Lanes of Communications* (SLOC) yang mencakup diantaranya Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Bila ditinjau dalam konteks hubungan antarnegara tetangga, posisi Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh negara-negara yang masuk dalam kelompok *British Commonwealth of Nations* yaitu Singapura, Malaysia, Australia, PNG, India, Brunei Darussalam. Dan sebagian negara-negara tersebut membuat pakta pertahanan *Five Power Defense Arrangement*, (FPDA) yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia dan New Zealand. Ada juga pakta *Australia, New Zealand dan Amerika*, (ANZUS). Indonesia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, "*Bebas dan Aktif*" berdiri dengan kekuatan sendiri di tengah tengah aliansi kedua pakta pertahanan. Adanya konflik yang terjadi pada tingkat lokal, regional maupun global ternyata mempunyai korelasi yang sangat kuat atas pemahaman yang disebut "*What lies beneath the surface*" Artinya, Wilayah-wilayah yang mengandung po-

tensi sumber daya alam seperti minyak, gas, berikutan *refinery*, distribusi dan jalur transportasi, juga komoditi strategis lainnya seperti; Emas, Tembaga, Biji Besi dll. merupakan *geopolitical flashpoints* yang perlu difokuskan untuk mendapat pengamanan secara khusus. Dari sini juga terindikasi sangat jelas bahwa ada korelasi antara wilayah yang mengandung kekayaan alam, baik itu lingkup domestik maupun lingkup internasional, dengan instabilitas politik. (*conflict intrastate and interstate*).

Dalam lingkup domestik, sejarah mencatat bahwa pertempuran di setiap wilayah Indonesia pada tahun 1941 sampai 1945 yang mempunyai kandungan minyak dan tempat proses pengolahannya menjadi sasaran strategis dari pihak lawan, sehingga pertempuran antara Belanda dan Jepang tidak terelakan, terutama di Palembang, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, padahal di saat bersamaan Belanda dan Jepang harus pula menghadapi pejuang-pejuang Indonesia.

Di saat itu juga terbentuk pakta pertahanan untuk mengepung kekuatan pejuang Indonesia diantaranya *Allied Forces Netherland East Indies* (AF-

NEI) gabungan Belanda, Inggris dan Australia, Ada juga *South East Asian Command* yang dibentuk Belanda untuk menghadapi pertempuran dengan Jepang di Kalimantan Timur. Sementara itu pakta pertahanan Amerika, British, Dutch, Australia, ABDACOM yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dibentuk semata mata untuk melindungi sumber energi terhadap serangan Jepang.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1941, Belanda tidak ingin ladang minyaknya diambil alih oleh Jepang. Karena itu dilakukanlah gerakan bumi hangus sumur minyak dan refinery (*scorched earth policy*) oleh Belanda. Meskipun demikian, Pasukan Jepang sudah mengantisipasi dengan kekuatan 4500 tentara, yang sebagian besar dibekali ilmu perminyakan. Saat itu posisinya sudah *stanby* terlebih dahulu di Singapura baru kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara dengan misi utama merehabilitasi instalasi minyak yang hancur karena dibumihanguskan oleh Belanda. Pada tahun 1948, ketika Ladang minyak Cepu serta kilangnya dikuasai Indonesia, Belanda berkeinginan merebutnya kembali. Pada saat yang bersamaan tentara Indonesia harus ber-

hadapan dengan PKI yang juga ingin menguasai Cepu. Dengan pertimbangan bahwa ladang minyak Cepu merupakan produksi terbesar di P Jawa dan sangat strategis, maka atas perintah pertama Panglima Besar Jendral Sudirman, upaya menghalau Belanda oleh pejuang Indonesia dari wilayah Cepu membuahkan hasil. Keberhasilan itu tidak lepas dari doktrin Panglima Besar Jendral Sudirman yang selalu ditanamkan kepada para prajurit yaitu "*Percaya Pada Kekuatan Sendiri*". Pada akhir dekade 50 an, melihat begitu strategisnya keberadaan ladang minyak di Indonesia, banyak tokoh sipil maupun militer berupaya untuk menata industri perminyakan. Diantara mereka yang paling menonjol yaitu konsep pemikiran Jenderal A.H. Nasution, yang saat itu menjabat KASAD. Visinya yakni memformulasikan bagaimana industri perminyakan ke depan dikelola dalam satu unit perusahaan, agar dapat sejajar dengan perusahaan minyak multinasional lainnya. Mengingat perusahaan-perusahaan minyak yang terpencah pencah di beberapa daerah maka perlu digabungkan pengelolaannya dari tingkat hulu sampai hilir dalam satu atap/wadah (*Vertical Integrated*). Dan pada saat yang bersamaan sebuah wadah

dalam bentuk perusahaan dibentuk dan langsung diangkat Kolonel Ibnu Sutowo, sebagai Direktur Utama. Indonesia pada era Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto memiliki dua wilayah yang mempunyai kandungan minyak dan gas sangat besar, yaitu Timor Timur, yang bertetangga dengan Australia dan Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Setelah memasuki era reformasi kedua wilayah tersebut lepas dari pangkuan NKRI. Ditinjau dari sudut *geostrategy*, kedua wilayah di atas tidak lepas dari suatu *grand strategy* yang sangat *visioner* agar Negara dapat secara berkesinambungan mempertahankan kekuatan nasional dan menunjang tingkat pertumbuhan ekonominya, serta merancang jauh ke depan guna menghindari faktor ketergantungan (*dependency*) pada minyak mentah. Tidaklah mengherankan pada saat itu Jendral Besar TNI (Purn) Soeharto memerintahkan seluruh elemen berjuang habis-habisan di forum internasional (*total diplomacy*) untuk mempertahankannya, sedangkan di dalam negeri memantapkan konsep dasar dari industri perminyakan *vertical integrated* UU No 8 tahun 71. Kedua aspek inilah merupakan bagian dari *Energy Security*.

Nasionalisme

Isu nasionalisme kembali mencuat ke permukaan ketika ada beberapa kalangan yang mempertanyakan atau mempunyai pandangan lain mengenai *Defense Cooperation Agreement (DCA)* antara Singapura dan Indonesia yang kecenderungannya lebih menguntungkan kepentingan nasional Singapura. DCA menjadi perdebatan publik karena dikaitkan dengan perjanjian ekstradisi yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Pada kesempatan ini tidak ada salahnya kita mengutip pandangan Alexandre del Valle, analis geopolitik dari Perancis dalam artikelnya yang berjudul: *From the Strategy to the Geopolitics*, mengatakan: "For the philosopher Jurgen Habermas, as for Francis Fukuyama or Fouad Ajami in the USA, or still Jacques Attali and Guy Sorman in France, the globalization would mean the death of the nationalism, traditional religions and civilization identities. It would seal the arrival of a peaceable "international community", even of a "world government" (UNO, WOC, OSCE, Criminal International Court of Hague, etc.). According to this concept, the States- Nations will

be real obstacles to the happiness of the human kind, which only the globalism can allow, installing a universal harmony."

Ada kecenderungan bahwa pihak Barat menghendaki nilai-nilai nasionalisme dari suatu bangsa itu tidak ada lagi, sementara Indonesia begitu memasuki era reformasi dan globalisasi, terkesan banyak masyarakat mengadopsi nilai-nilai Barat, bahkan bagi sekelompok orang, akan menjunjungnya setinggi langit. Apalagi kalau sudah mempunyai afiliasi dengan suatu institusi dari negara lain, sepertinya sudah berada pada posisi yang paling luhur pandangannya/pendapatnya. Sedangkan nilai-nilai hakiki Indonesia diletakkan setingkat di bawah nilai/symbol barat. Henry Kissinger pada suatu kesempatan, mengatakan bahwa globalisasi itu berarti *Americanized* dunia. Padahal belum tentu nilai-nilai tersebut sepenuhnya dapat diadopsi dan dijalankan sesuai kultur di Indonesia.

Ada suatu contoh yang sangat menarik tentang nasionalisme. Tentu kita masih ingat soal perebutan pengelolaan ladang minyak Cepu yang akhirnya dikelola oleh Exxonmobil. Pada waktu itu, ada sebagian tokoh ma-

sarakat yang mengatakan bahwa kalau memperjuangkan *operatorship* Cepu oleh Pertamina itu menganut aliran nasionalisme sempit. Padahal kita ketahui bahwa Pertamina merupakan simbol perusahaan minyak Indonesia yang merupakan kebanggaan bangsa, sekaligus menjadikan perusahaan tersebut sejajar dengan perusahaan minyak multinasional kalau diberikan kepercayaan mengelola ladang tersebut. Dalam kaitan itu, tidak ada salahnya kita bandingkan dengan ladang minyak Unocal yang hendak diambil alih oleh perusahaan minyak Cina, CNOOC dengan nilai US\$ 18.5 miliar. Kenyataan pahit harus dihadapi oleh Cina, meskipun dengan penawaran harga paling tinggi, harus dibatalkan oleh kongres Amerika karena kalau hak kelola (*operatorship*) ladang minyak dan gas Unocal pindah tangan ke Cina, dianggap dapat mengancam *National Security* AS. Padahal sebagian besar ladang minyak dan gas Unocal itu berada di luar wilayah teritorial Amerika Serikat. Lantas mengapa Amerika menyatakan pengambilalihan ladang minyak itu merupakan ancaman *National Security*-nya? Apakah tindakan itu merupakan paham nasionalisme Amerika yang sempit? Untuk menjawab per-

tanyaan di atas sangat sederhana, yakni Amerika telah menempatkan aspek minyak ke dalam agenda panggilan kepentingan nasional. Kalau sudah masuk dalam agenda panggilan kepentingan nasional tentu semua elemen bangsa akan bersikap satu suara. Seluruh elemen pada struktur organisasi organik di pemerintahan, atau pun kongres, parelemen, LSM, Universitas akan bergerak dalam satu suara. Yang diringkaskan: *what are the links between oil and US politics? The answer: The President of the United States, the Vice-President, the Defense Secretary and his Deputy, the Attorney General, The Chairman of the National Security Council, the CIA Chief - all had links with oil. Never in history has a government been so clearly identified with one industry.* Maka yang menjadi kekhawatiran soal DCA yakni wilayah yang dikehendaki untuk latihan merupakan wilayah yang mempunyai kandungan migas sangat besar serta jalur transportasi yang merupakan bagian dari *chokepoint* Selat Malaka. Dalam ilmu militer penguasaan data geografi merupakan informasi sangat utama untuk memenangkan pertempuran/peperangan. General US Army (Ret) John Vessey, JR yang pernah menjabat sebagai Chairman of The Joint

Ciefs of Staff pada tahun 1982-85 juga mengatakan bahwa :

"In future wars, knowledge may be more important than terrain," but geography still exerts enormous influence on military operations, war, and security as it has throughout history. Great commanders, past and present, understand that topography, weather, and climate not only affect strategies but battle and support plans. History in fact is replete with enormous penalties incurred by those who paid too little attention to geographic factors."

Selanjutnya John Vessey membagi empat elemen pokok atas pengetahuan Geography yang perlu dikuasai oleh tentara pada suatu Negara yakni:

1. PHYSICAL GEOGRAPHY
2. CULTURAL GEOGRAPHY
3. POLITICAL-MILITARY GEOGRAPHY
4. AREA ANALYSES

Dari setiap elemen itu terdapat beberapa sub bagian seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. PHYSICAL GEOGRAPHY:
 - A. SPATIAL RELATIONSHIPS

Location

Size

Shape

B. LAY OF THE LAND

Land Forms

Rivers and Reservoirs

Geology and Soils

Vegetation

C. OCEANS AND SEASHORES

Sea Water Attributes

Sea Surface Behavior

Marine Topography

Representative Naval Ramifications

D. EARTH'S ATMOSPHERE

Atmospheric Phenomena

Climatology for Military Strategists

Meteorology for Military Operators

E. REGIONAL PECULIARITIES

Frigid Flatlands

Frigid Seas

Mountainous Regions

Arid Regions

Tropical Rain Forests

Wetlands

Coastlands and Small Seas

F. INNER AND OUTER SPACE

Space Compared with Land and

Sea

Region I: Aerospace Interfaces

Region II: Circumterrestrial Space

Region III: Moon and Environs

Region IV: Outer Envelope

Tips for Military Space Planners

G. NATURAL RESOURCES AND

RAW MATERIALS

Sources and Shortages

Compensatory Programs

Resource Deprivation

2. CULTURAL GEOGRAPHY

A. POPULATIONS

Demography

Physical Attributes

Cultural Characteristics

Current Attitudes

National Personalities

Cross-Cultural Skills

B. URBANIZATION

Sites and Structures

Urban Sprawl

Conventional Urban Combat

Unconventional Urban Combat

Conventional Urban Bombardment

Urban Centers and Nuclear Strategy

Overall Urban Vulnerabilities

C. LINES OF COMMUNICATION

Roads
 Railroads
 Military Airports
 Seaports and Harbors
 Spaceports and Flight Paths
 Inland Waterways
 Pipelines

C. MILITARY AREAS OF RESPONSIBILITY

Global Subdivisions
 Regional Areas of Responsibility
 Useful Insights
 Theater and Tactical AORs

D. MILITARY BASES

E. FORTRESSES AND FIELD FORTIFICATIONS

Precedents and Prognoses
 Fortified Points
 Fortified Lines
 Offensive Fortifications
 Fortifications in the Nuclear Age
 Citadels Versus CW and BW
 Weapons

3. POLITICAL-MILITARY GEOGRAPHY :

A. MILITARY SERVICE PREDICTIONS

Diversified Viewpoints
 Integrated and Updated Views

B. GEOPOLITICAL FRICTION

Territorial Limits
 Strategic Friction
 Economic Friction
 Cultural Friction
 Environmental Friction

4. AREA ANALYSES :

A. FORMAT FOR AREA ANALYSIS

Geographical Data Bases
 Military Missions
 Military Implications
 Effects on Courses

Melihat begitu strategisnya wilayah kerjasama yang dikehendaki Singapura, timbul tiga pertanyaan yang mengganjal ,Pertama ; Mengapa Singapura yang menentukan wilayah latihan militernya terutama Alpha Satu? Kedua; Mengapa Singapura tidak melakukannya dengan sesama rumpun *commonwealth* seperti Malaysia, Australia atau PNG ? Ketiga ; akankah Indonesia secara tidak langsung menjadi bagian (*extention*) dari pakta pertahanan FPDA seandainya DCA diratifikasi oleh DPR?

Dengan pertimbangan uraian di atas dan empat elemen geography, berarti tentara Singapura akan mendapat-

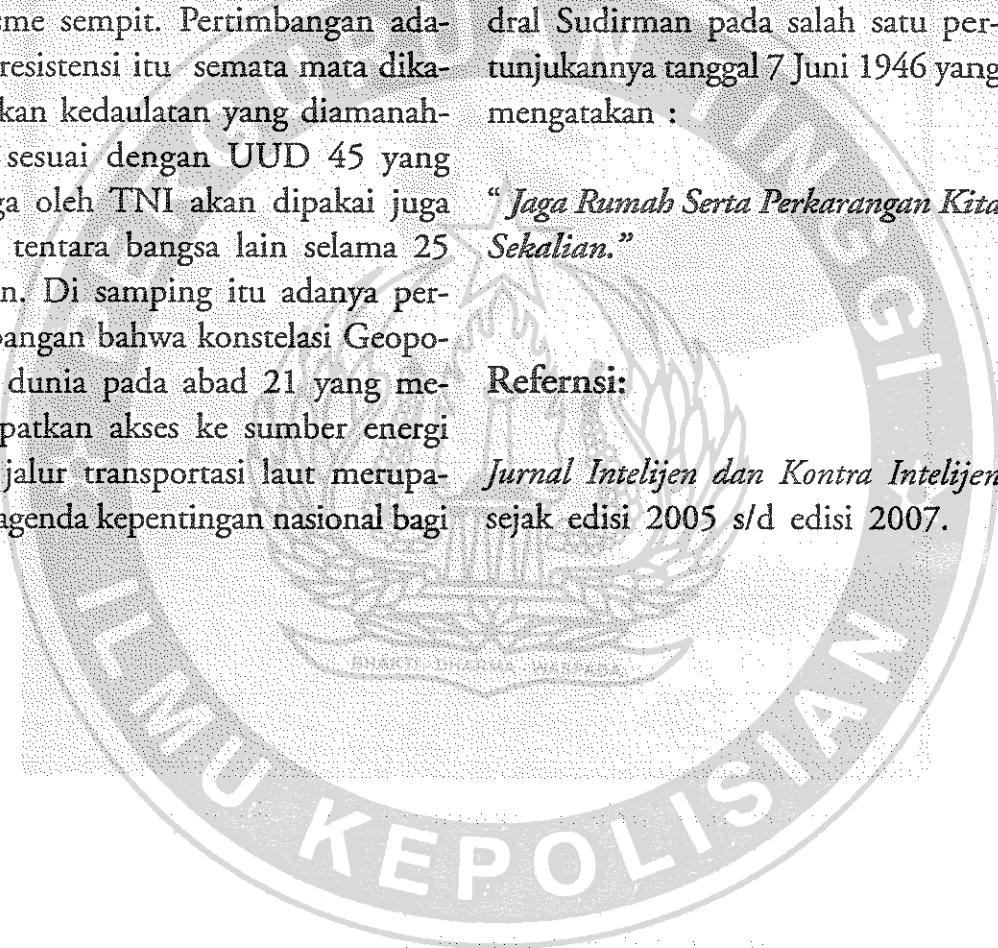
kan informasi tentang elemen-elemen geopolitik dari wilayah yang mempunyai kandungan energy sangat besar di Indonesia. Maka tidaklah mengherankan kalau sebagian masyarakat mempunyai resistensi dan itu bukan berarti penganut aliran nasionalisme sempit. Pertimbangan adanya resistensi itu semata mata dikarenakan kedaulatan yang diamankan sesuai dengan UUD 45 yang dijaga oleh TNI akan dipakai juga oleh tentara bangsa lain selama 25 tahun. Di samping itu adanya pertimbangan bahwa konstelasi Geopolitik dunia pada abad 21 yang menempatkan akses ke sumber energi dan jalur transportasi laut merupakan agenda kepentingan nasional bagi

negara-negara industri. Deep Stoaat dalam suatu kajian strategisnya mengatakan *"if you would understand geopolitics today, follow the Oil"* Dengan berbagai pertimbangan tidak ada salahnya kalau kita merenungkan kembali pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada salah satu pertunjukannya tanggal 7 Juni 1946 yang mengatakan :

"Jaga Rumah Serta Perkarangan Kita Sekalian."

Referensi:

Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen sejak edisi 2005 s/d edisi 2007.





PANGLIMA BESAR JENDERAL SOEDIRMAN

CUKILAN DARI AMANAT PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN PADA TANGGAL 7 JUNI 1946.

1. PERCAYA KEPADA KEKUATAN SENDIRI.
2. TERUSKAN PERJOANGANMU KORBAN SUDAH CUKUP BANYAK.
3. PERTAHANKAN RUMAH DAN PEKARANGAN KITA SEKALIAN.
4. TENTARA KITA JANGAN SEKALI – KALI MENGENAL SIFAT MENYERAH KEPADA SIAPAPUN JUGA YANG AKAN MENJAJAH KITA KEMBALI.
5. PEGANG TEGUH DISIPLIN TENTARA LAHIR BATHIN.